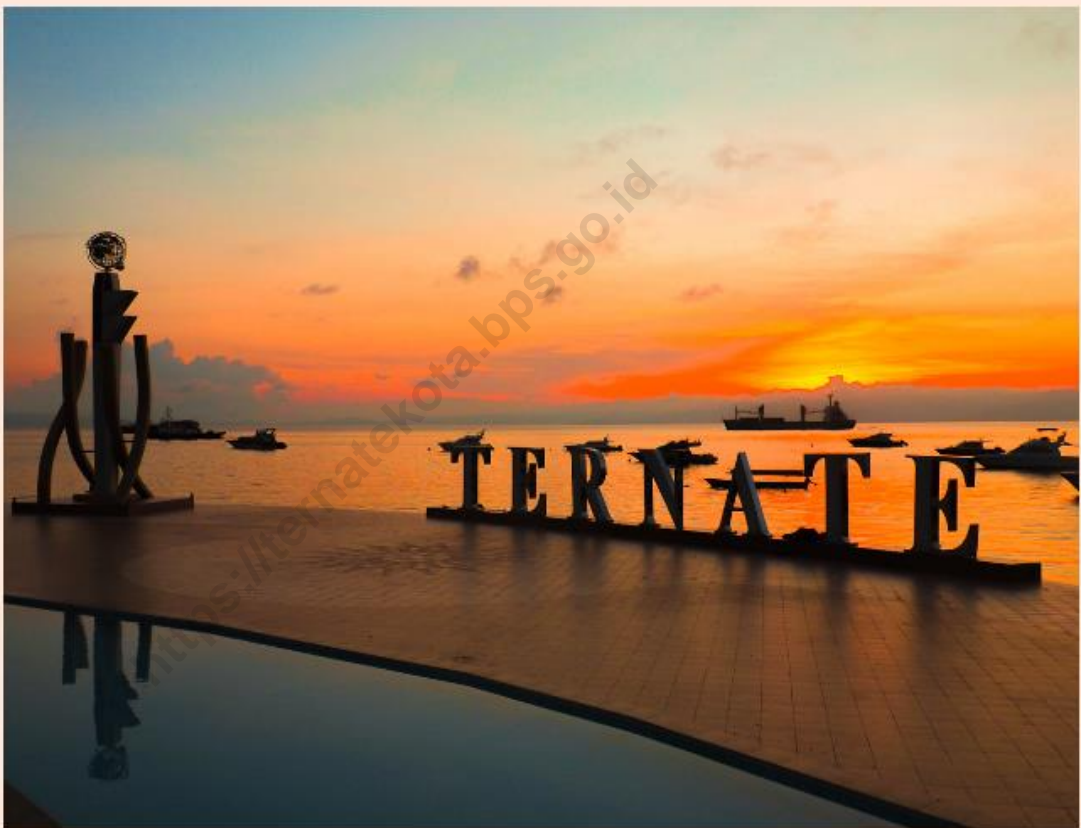


Indikator Kesejahteraan Rakyat

KOTA TERNATE 2018



Badan Pusat Statistik Kota Ternate

Indikator Kesejahteraan Rakyat

KOTA TERNATE 2018



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate 2018

ISSN:

No. Publikasi: 82710.1901

Katalog: 4102004.8271

Ukuran Buku: 17.6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: x + 45 halaman

Naskah:

Tim Penyusun

Penyunting/editor:

Tim Penyusun

Gambar Sampul:

Tim Penyusun

Diterbitkan oleh:

© BPS Kota Ternate

Dicetak oleh:

© BPS Kota Ternate

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Muhammad Rismat R., SE., M.Si.

Penanggung Jawab Umum:

Muhammad Rismat R., SE., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis:

Muhammad Rismat R., SE., M.Si.

Penyunting:

Ati'ah Dyah Lestari, SST.

Penulis:

Warisna Endah Fitrianti, SST.

Pengolah Data:

Warisna Endah Fitrianti, SST.

Desain:

Warisna Endah Fitrianti, SST.

KEPALA BPS KOTA TERNATE



Muhammad Rismat R., SE., M.Si.



KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate 2018 merupakan publikasi ketiga BPS Kota Ternate yang menyajikan data tentang indikator kesejahteraan rakyat Kota Ternate. Data yang digunakan bersumber dari Susenas, Sakernas, Proyeksi Penduduk berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Kota Ternate dalam Angka.

Dimensi kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semua dapat diukur. Menyadari hal tersebut, publikasi ini hanya mencakup pada beberapa aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Indikator kesejahteraan rakyat yang dikaji dalam publikasi ini meliputi bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta bidang sosial lainnya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ternate, Mei 2019
Kepala BPS Kota Ternate

Muhammad Rismat R., SE., M.Si.
NIP. 19710428 199103 1 003

DAFTAR ISI

halaman

Kepala BPS Kota Ternate	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Singkatan dan Akronim	x
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Konsep dan Definisi	4
1.5 Metodologi	9
1.5.1 Sistematika Penulisan	9
1.5.2 Sumber Data	11
2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	13
2.2 Komposisi dan kepadatan penduduk	14
2.3 Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi	16
3.1 Keluhan Kesehatan Penduduk	20
3.2 Asuransi Kesehatan	22
3.3 Penolong Kelahiran	23
4.1 Angka Melek Huruf (amh)	28
4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	30
4.3 Angka Partisipasi MURNI (APM)	31
5.1 Fasilitas Rumah Tinggal	34
5.2 Status Penguasaan Bangunan	38
6.1 Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi	41
6.2 Program PERLINDUNGAN SOSIAL	42
Daftar Pustaka	45

DAFTAR TABEL

	halaman
2.1 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin (10 Tahunan) 2018	15
2.2 Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Kota Ternate Tahun 2018.....	16
2.3 Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2018.....	17
4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2018	31
4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Ternate 2018	33
5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan di Kota Ternate, 2018	37
5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Ternate, 2018	39
6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2018	45

DAFTAR GAMBAR

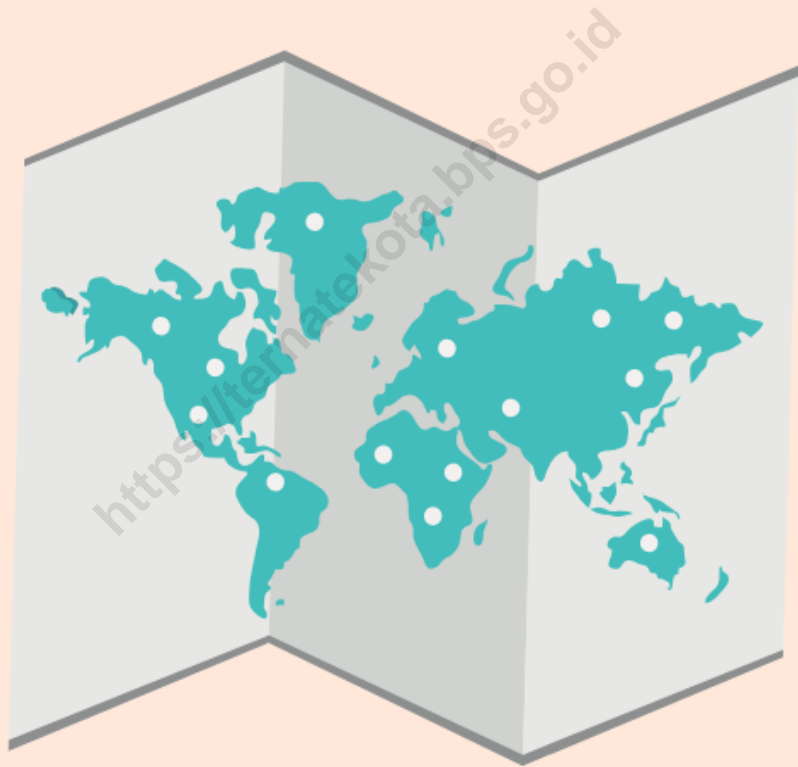
	halaman
3.1 Angka Kesakitan Menurut Karakteristik	22
3.2 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2018	24
3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Karakteristik, 2018.....	25
4.1 Persentase Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2015-2018	30
6.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2018	43

SINGKATAN DAN AKRONIM

APK/GER	Angka Partisipasi Kasar/Gross Enrollment Ratio
APM/NER	Angka Partisipasi Murni/Net Enrollment Ratio
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
D1/D2/D3	Diploma 1/ Diploma 2 / Diploma3
Lk	Laki-laki
Lk + Pr	Laki-laki + Perempuan
Pr	Perempuan
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
MI	Madrasah Ibtidaiyah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
Wajar	Wajib Belajar

BAB I

PENDAHULUAN



1 Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Pada dasarnya tujuan pokok dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dimaksud tidak hanya menyangkut kemampuan dalam mencukupi kebutuhan yang bersifat materil (sandang, papan dan pangan), namun juga pemenuhan kebutuhan bersifat non materil (pendidikan, kesehatan, rasa aman, sanitasi lingkungan, dll). Dengan pemenuhan kebutuhan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mengelola pembangunan menjadi semakin baik.

Dalam proses pembangunan senantiasa diupayakan peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan juga menikmati hasil pembangunan, dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan perlu diukur tingkat keberhasilannya. Untuk mengukur pelaksanaan pembangunan secara luas yang meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi, tentunya diperlukan data statistik. Peranan data sangat penting karena data merupakan bahan baku bagi penyusunan statistik/indikator yang digunakan untuk melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Kebutuhan data sosial, khususnya mengenai Kesejahteraan Rakyat

(Kesra), perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup.

BPS dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab atas tersedianya data secara berkesinambungan guna menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) merupakan salah satu survei yang dilaksanakan oleh Badan pusat Statistik (BPS). Survei ini dilaksanakan tiap 6 bulan dengan tujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Data yang dihasilkan dari survei ini meliputi informasi tentang demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi rumah tangga, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan sosial lainnya. Data-data tersebut dapat disajikan dalam publikasi seperti Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate 2018 ini.

1.2 TUJUAN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate 2018 diterbitkan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan data guna pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat di Kota Ternate. Publikasi ini berisi kumpulan indikator berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate dan selanjutnya dapat

bermanfaat sebagai bahan informasi dalam hal perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

1.3 RUANG LINGKUP

Aspek Kesejahteraan seperti diketahui memiliki dimensi yang luas, tidak hanya menyangkut aspek materi saja seperti pendapatan, konsumsi, dan pemilikan barang-barang berharga, melainkan juga aspek non materi seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan lain-lain. Mengingat aspek kesejahteraan yang begitu luas, maka sangatlah tidak mungkin untuk dapat menyajikan seluruh data statistik guna mengukur tingkat kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu, indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya menyangkut aspek kesejahteraan yang dapat diukur. Dalam publikasi ini data disajikan dengan ukuran-ukuran seperti jumlah, proporsi, rasio dan angka/tingkat. Penyajian indikator sebagian besar merupakan agregasi pada tingkat Kota Ternate, sementara beberapa indikator lainnya disajikan pada tingkat kecamatan. Data disajikan dalam tiga periode waktu untuk melihat tingkat perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya.

1.4 KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan maka sebelum data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu ditentukan batasan terhadap keterangan yang akan

dikumpulkan. Batasan tersebut diusahakan baku dan berlaku umum untuk para pemakai data. Adapun konsep dan definisi tersebut adalah:

Rumah tangga Biasa

Seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

Rumah Tangga Khusus

Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per km².

Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dikali 100.

Kawin

Mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Cerai Hidup

Berpisah sebagai suami /istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan.

Cerai Mati

Ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Metode Kontrasepsi

Alat/cara pencegah kehamilan.

Air Minum Bersih

Air yang bersumber dari leding, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) ≥ 10 meter.

Sekolah

Kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak atau Belum Pernah Sekolah

Tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi.

Tidak Sekolah Lagi

Pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapat tanda tamat ijazah.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Melek Huruf

Penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batasan usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak usia sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Keluhan Kesehatan

Keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita

penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti, dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu termasuk juga mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.

Bukan Angkatan Kerja

Mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumahtangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun ke atas.

$$TPAK = \frac{AK}{P_{15+}} \times 100$$

Keterangan :

AK = Angkatan Kerja

P₁₅₊ = Penduduk Usia 15 tahun ke atas

Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

Pengangguran

Pengangguran termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum bekerja dan yang di PHK tetapi masih berhasrat untuk bekerja.

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,

serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{TM}{AK} \times 100$$

Keterangan :

TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka
TM	= Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan
AK	= Jumlah Angkatan Kerja

Bekerja

Kegiatan melakukan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Rasio ketergantungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100.

-**Rasio Ketergantungan Anak** adalah penduduk usia 0-14 tahun dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

- **Rasio Ketergantungan Lanjut Usia** adalah penduduk usia 65 tahun keatas dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Pekerja tidak dibayar

Seseorang yang bekerja/membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga/rumah tangga atau bahkan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja.

Garis Kemiskinan Pengeluaran

Batas minimal pengeluaran konsumsi penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang dapat bersifat mendasar.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

1.5 METODOLOGI

1.5.1 SISTEMATIKA PENULISAN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate Tahun 2018 disusun dalam delapan bab pokok bahasan.

- Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, konsep dan defenisi, serta metodologi.
- Bab kedua menguraikan penjabaran mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, rasio ketergantungan dan bonus demografi, umur perkawinan pertama, status perkawinan, serta keluarga berencana.
- Bab ketiga menyajikan penjelasan mengenai kesehatan, seperti keluhan kesehatan, asuransi kesehatan, penolong kelahiran, lamanya diberi ASI serta imunisasi.
- Bab empat menyajikan tentang kondisi pendidikan penduduk yang mencakup angka melek huruf, angka

partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, serta angka partisipasi kasar.

- Bab kelima mengenai Ketenagakerjaan. Di dalamnya dibahas tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran, serta lapangan dan status pekerjaan.
- Bab keenam menyajikan tentang perkembangan kemiskinan serta pengeluaran rumah tangga.
- Bab ketujuh membahas gambaran mengenai perumahan dan lingkungan hidup yang mencakup kualitas dan fasilitas rumah tinggal serta status penguasaan bangunan.
- Bab kedelapan terkhusus membahas indikator lain yang tidak tercakup di 7 indikator dasar, namun turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti, akses terhadap teknologi, program perlindungan sosial, kepemilikan aset, dan pola kebiasaan merokok.

Secara terpisah kedelapan pokok bahasan tersebut diharapkan mampu memberi gambaran tingkat kesejahteraan penduduk. Karena disajikan secara terpisah, maka Inkesra ini memberikan informasi lengkap tentang dampak pembangunan di semua sektor. Namun demikian, hasil kajian aspek tersebut mempunyai kendala yaitu tidak memberikan angka tunggal sebagai gabungan dari semua indikator yang dapat menjadi pembandingan tingkat kemajuan yang dicapai antar waktu, maupun kesimpulan mengenai bagian mana yang memang seharusnya ditingkatkan lebih dahulu sebagai rancangan pembangunan ke

depan.

1.5.2 SUMBER DATA

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018 ditambah beberapa data lain yang terkait. Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial yang paling luas, dan sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Data yang dicakup dalam Susenas antara lain bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, serta konsumsi rumahtangga.

Untuk itu, data Susenas sangat potensial dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat, ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, persentase akseptor KB, persentase ibu melahirkan ditolong oleh tenaga medis, persentase rumahtangga menggunakan sumber air bersih, menikmati listrik dan rata-rata pengeluaran sebulan.

BAB II

KEPENDUDUKAN

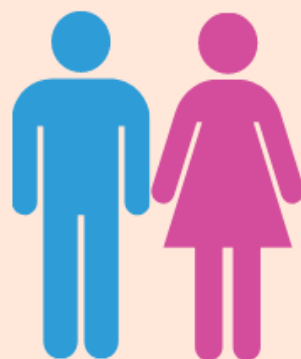


**KEPADATAN
PENDUDUK**

**1376,97
JIWA/KM²**

SEX RATIO

103



2 Kependudukan

Penduduk selain sebagai pelaksana juga menjadi sasaran utama dalam pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah penduduk yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Oleh karena itu dalam menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai karakteristik yang menguntungkan pembangunan. Selain itu pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

2.1 JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Jumlah penduduk di Kota Ternate dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Ternate pada 2013 sebanyak 202.728 jiwa. Sementara pada 2014, 2015, dan 2016 meningkat menjadi 207.789 jiwa, 212.997 jiwa, dan 218.028 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Ternate sebanyak 223.111 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah serius, mengancam ketahanan pangan, meningkatkan kemiskinan, pengangguran hingga kriminalitas. Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus

dilakukan secara berkesinambungan.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Ternate terus menurun selama lima tahun terakhir. Namun, besaran laju tersebut masih di atas laju pertumbuhan Provinsi Maluku Utara

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Ternate kemungkinan besar lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan migrasi. Kota Ternate notabene merupakan pusat perdagangan, industri, pendidikan dan kesehatan di provinsi ini, sehingga sangat wajar banyaknya pendatang sulit dibendung untuk mengurangi laju pertumbuhan tersebut.

2.2 KOMPOSISI DAN KEPADATAN PENDUDUK

Komposisi penduduk merupakan hal penting dalam pertimbangan pembangunan supaya pembangunan lebih tepat sasaran. Dalam pembangunan, perlu melihat suatu kelompok yang perlu diprioritaskan dibanding yang lain. Hal ini dikarenakan daerah memiliki komposisi penduduk yang berbeda.

Tabel 2.2 di bawah ini menunjukkan bahwa sebagian besar komposisi penduduk Kota Ternate adalah penduduk berusia muda dan produktif (piramida penduduk ekspansif). Hal ini terlihat dari persentase penduduk berusia 20-29 tahun adalah yang terbanyak di antara jenis persentase usia lainnya, yakni sebanyak 21,62 persen. Sedangkan penduduk berusia 10-19 tahun di Kota Ternate pada tahun 2018 adalah sebesar 18,51 persen (terbesar kedua).

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang berusia muda

dan produktif, pemerintah sebaiknya berfokus kepada fasilitas pendidikan untuk memberikan pendidikan dasar, menengah dan lanjutan yang baik untuk menciptakan generasi atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Selain pendidikan, lapangan kerja juga dapat menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehubungan dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin (10 Tahunan) 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 9	18.56	18.12	18.34
10 -19	18.24	18.80	18.51
20 -29	22.56	20.65	21.62
30 – 39	16.09	16.27	16.18
40 – 49	12.16	12.54	12.34
50 – 59	7.35	7.83	7.59
60 +	5.04	5.79	5.41
Kota Ternate	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Sementara perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di Kota Ternate pada tahun 2018 adalah 103,22. Hal ini bisa dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 103 hingga 104 penduduk laki-laki

yang ada di Ternate pada tahun 2018. Dengan demikian dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki di Kota Ternate masih lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Kota Ternate merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Maluku Utara dengan luas daratan sekitar 162,03 km². Pada tabel 2.3, kepadatan penduduk Kota Ternate yaitu sebesar 1.376,97 jiwa/km². Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah per km². Sehingga arti dari angka 1.376,97 yaitu setiap satu kilometer persegi wilayah Kota Ternate dihuni sekitar 1376 hingga 1377 penduduk.

Tabel 2.2 Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Kota Ternate Tahun 2018

Kelompok Umur	2018
(1)	
Sex Ratio	103,22
Kepadatan	1376,97
Kota Ternate	

Sumber: BPS, Daerah Dalam Angka Kota Ternate 2018

2.3 RASIO KETERGANTUNGAN DAN BONUS DEMOGRAFI

Jumlah penduduk yang besar tidak akan terlalu menjadi

masalah ketika rasio ketergantungannya relatif kecil. Artinya, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) cenderung lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Ketika rasio ketergantungan anak dan lansia ini kecil, diharapkan penduduk usia produktif akan mempunyai lebih banyak kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dirinya karena semakin kecil beban tanggungan atas usia tidak produktif.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2018

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	27.36	69.23	3.41	100.00
Perempuan	25.55	70.69	3.77	100.00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Terlihat pada tahun 2018 struktur umur penduduk Kota Ternate lebih didominasi penduduk usia produktif yang besarnya mencapai 70 persen. Kondisi ini berimplikasi pada cukup rendahnya rasio ketergantungan, yaitu sebesar 44,53 pada tahun 2018. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif *hanya* menanggung beban 44-45 penduduk usia tidak produktif. Dibandingkan periode sebelumnya, angka ini meningkat. Angka ketergantungan ini jauh lebih kecil dibandingkan rasio ketergantungan Provinsi Maluku Utara yang sebesar 59,67.

Rasio Ketergantungan yang relatif kecil ini dikenal dengan istilah bonus demografi (*demographic gift*). Dalam kenyataannya, bonus ini tidak selalu membawa sisi positif bagi wilayah yang menerimanya. Membludaknya usia produktif memang diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi yang potensial sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, usia produktif yang besar jika tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup juga akan menimbulkan masalah pengangguran dan kemiskinan yang akhirnya berujung pada tingginya angka kriminalitas. Untuk itu, perlu tindakan preventif dari pemerintah tidak hanya upaya penyediaan lapangan kerja tapi juga peningkatan kualitas SDM antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai, diharapkan penduduk usia produktif tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi juga menjadi penyedia lapangan kerja itu sendiri. Di sisi lain, bonus demografi ini juga menjadi indikator penurunan fertilitas dan angka kematian bayi secara jangka panjang.

Bonus demografi ini sejatinya tidak akan berlangsung terus menerus. Sejak tahun 2011, angka ini meningkat 0,01 dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2013 ke tahun 2014. Pada 2015 angkanya melonjak 0,85 dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2016 angka ketergantungan mengalami penurunan 0,82 dari tahun sebelumnya. Kemudian 2018, mengalami peningkatan kembali sebesar 0,02.

BAB III KESEHATAN



**PENGUNAAN
ASURANSI
KESEHATAN
UNTUK BEROBAT
56,30 PERSEN**

**PERSALINAN
DIBANTU
TENAGA KESEHATAN
96,45 PERSEN**



3 Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan bertujuan agar semua masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, sehingga tercapai tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya, serta penyediaan fasilitas air minum bersih. Selain itu pemerintah juga melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, diantaranya dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku sehat dan peningkatan mutu tenaga kesehatan.

Kesehatan merupakan bagian dari indikator kesejahteraan rakyat, dimana angka harapan hidup dan kematian bayi sebagai indikator utamanya. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

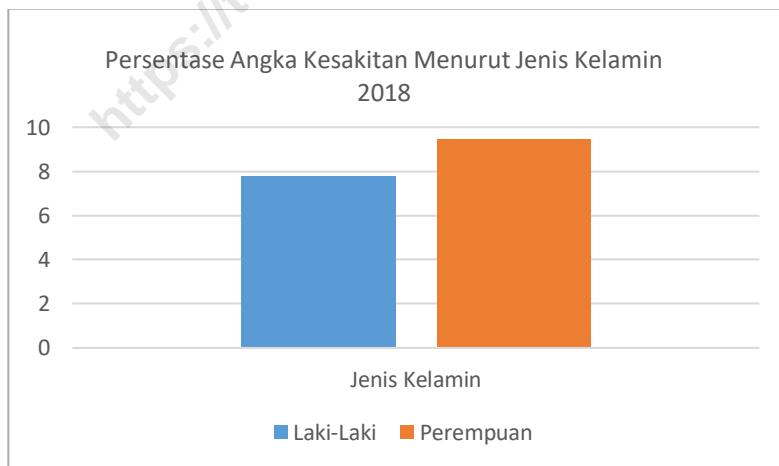
3.1 KELUHAN KESEHATAN PENDUDUK

Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis dan belum sembuh. Keluhan kesehatan menjadi salah satu indikator untuk melihat apakah suatu masyarakat memiliki

lingkungan dan pola hidup yang sehat. Keluhan kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu.

Banyaknya keluhan kesehatan menjadi indikasi bahwa masyarakat memiliki lingkungan ataupun pola hidup yang tidak sehat. Misalnya, masyarakat banyak mengeluh mengenai seringnya mereka terkena penyakit gatal-gatal, hal ini tentunya menjadi indikasi bahwa banyaknya keluhan mengenai penyakit kulit ini bisa disebabkan kurang tersedianya air bersih di lingkungan tersebut. Dalam menentukan ada atau tidaknya keluhan masyarakat, susenas mengambil referensi waktu sebulan yang lalu.

Gambar 3.1 Angka Kesakitan Menurut Karakteristik



Sumber: BPS, Susenas 2015-2018

Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Referensi waktu yang

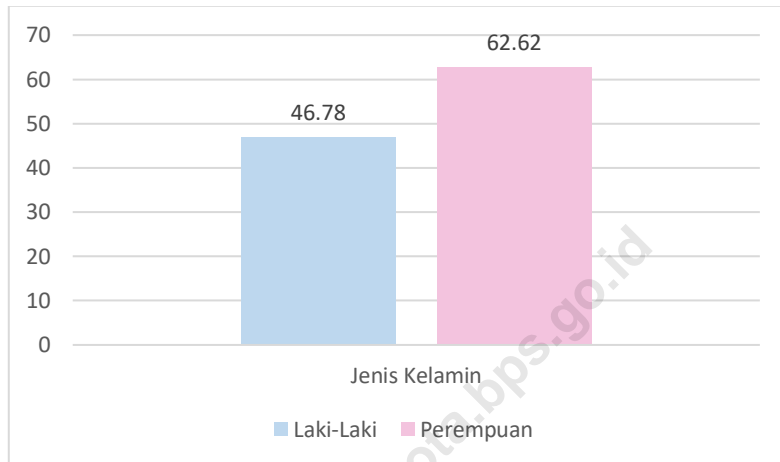
digunakan dalam Susenas adalah sebulan yang lalu. Gambar 3.1 menyajikan persentase angka kesakitan menurut jenis kelamin pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin wanita di Kota Ternate pada tahun 2018 mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki.

3.2 ASURANSI KESEHATAN

Jaminan kesehatan bagi anggota keluarga saat ini sudah menjadi sebuah keharusan. Dengan jaminan kesehatan yang memadai maka kualitas hidup bisa menjadi lebih baik, karena apabila diantara keluarga mengalami sakit dan perlu perawatan medis maka dengan segera dapat tertangani tanpa harus memikirkan biaya. Dengan biaya kesehatan yang terus meningkat saat ini, kepemilikan jaminan kesehatan menjadi sangat penting.

Saat ini pemerintah gencar melakukan sosialisasi akan pentingnya suatu jaminan kesehatan bagi masyarakat. Berbagai jenis jaminan kesehatan tersedia sebagai upaya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan upaya pemerintah dalam mensosialisasikan jaminan kesehatan dapat dilakukan antara lain dengan melihat kepemilikan jaminan kesehatan yang ada di masyarakat.

Gambar 3.2 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2018



Sumber: BPS, Susenas 2018

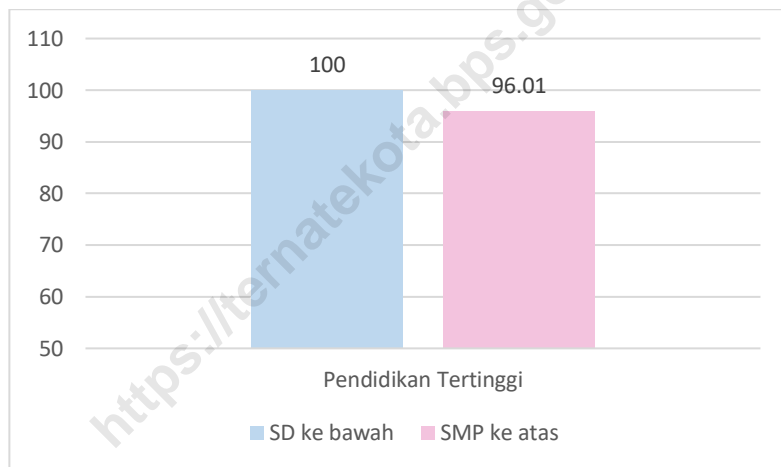
Berdasarkan hasil Susenas 2018 di Kota Ternate memang lebih dari separuh (sebesar 62,62 persen) penduduk perempuan menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Akan tetapi pengguna jaminan kesehatan untuk berobat jalan berjenis kelamin laki-laki belum mencapai separuh penduduk laki-laki di Kota Ternate (46,78 persen). Hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan pelaksana kebijakan di bidang kesehatan Kota Ternate untuk mengedukasi penduduk mengenai penggunaan jaminan kesehatan ini, sehingga program dan bantuan dari pemerintah dapat dialokasikan dengan baik.

3.3 PENOLONG KELAHIRAN

Sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi,

penolong persalinan tentu diharapkan orang yang ahli di bidangnya. Di Kota Ternate sendiri terdapat berbagai macam penolong kelahiran anak, mulai dari tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan serta bukan tenaga kesehatan seperti dukun bersalin, hingga ditolong oleh keluarga sendiri.

Gambar 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Karakteristik, 2018



Sumber: BPS, Susenas 2018

Hasil Susenas menunjukkan rata-rata perempuan kawin berumur 15-49 tahun di Kota Ternate pada tahun 2018 melakukan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan. Rinciannya, seluruh perempuan kawin berusia 15-49 tahun dengan pendidikan terakhir SD ke bawah persalinannya dibantu oleh tenaga kesehatan. Sedangkan perempuan kawin berusia 15-49 tahun dengan pendidikan terakhir minimal SMP, hanya 4,99 persen saja

yang persalinannya tidak dibantu oleh tenaga kesehatan. Kesadaran masyarakat terhadap penolong kelahiran sudah baik dengan mempercayai tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya. Hanya sebagian kecil yang ditolong oleh selainya. Bahkan di tahun 2018, tidak sampai 5 persen masyarakat ditolong oleh selain tenaga kesehatan yang kurang memadai kemampuannya.

Harapannya kedepan, semakin banyak ibu hamil yang ditolong proses kelahirannya oleh tenaga kesehatan, sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat semakin menurun.

BAB IV PENDIDIKAN



**ANGKA
MELEK HURUF
99,76**

**ANGKA
PARTISIPASI
SEKOLAH
84,61 PERSEN**



<https://ternatekota.bps.go.id>

4 Pendidikan

Kita semua sepakat bahwa pendidikan mempunyai peran besar dalam pembangunan suatu bangsa. Dengan pendidikan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negaranya. Pembangunan pendidikan juga mempunyai *multiplier effect* pada pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Bisa dikatakan, pendidikan merupakan modal pada berbagai dimensi kehidupan lainnya.

Diharapkan, pendidikan di negeri ini semakin berkualitas dari waktu ke waktu, di mana kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di bidang pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, antara lain anggaran pendidikan, kualitas guru, ketersediaan sarana prasarana, kualitas kurikulum hingga pemerataan pendidikan, yang dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan pendidikan bagi setiap penduduk usia sekolah secara berkualitas dan relevan dengan pembangunan dan dikelola secara efisien. Pemerataan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti pembangunan gedung sekolah, gedung laboratorium, gedung perpustakaan dan tambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep “link and match”, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah

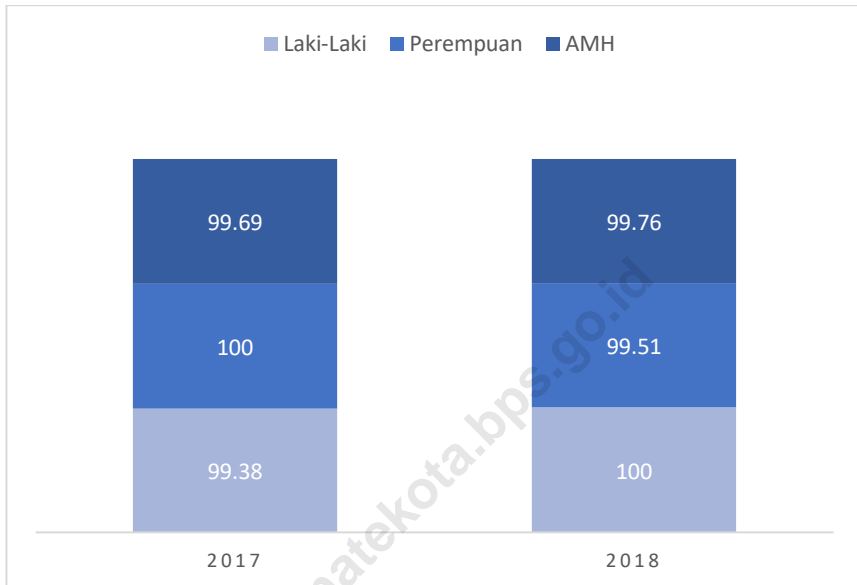
menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pencapaian program pembangunan pendidikan dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat secara umum diukur melalui perubahan dan perkembangan tingkat pendidikan masyarakat yang berhasil dicapai selama periode waktu tertentu. Hasil pembangunan pendidikan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator bidang pendidikan, antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), tingkat/jenjang pendidikan yang ditamatkan, angka putus sekolah, dan rata-rata lama sekolah.

4.1 ANGKA MELEK HURUF (AMH)

AMH merupakan salah satu indikator sederhana yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pendidikan suatu bangsa, serta adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. AMH menggambarkan suatu potensi untuk pertumbuhan intelektual lebih lanjut dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat. Semakin besar AMH orang dewasa, berarti semakin banyak penduduk yang mampu dan mengerti baca tulis. AMH yang dibahas dalam bab ini adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Gambar 4.1 Persentase Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2015-2018



Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

AMH Kota Ternate sudah cukup baik, mencapai 99,76 persen pada tahun 2018 di mana AMH laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, masing-masing sebesar 100 persen dan 99,51 persen. Meskipun AMH perempuan menurun dari 100 persen pada tahun 2017, namun AMH secara keseluruhan meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018. Program-program dan anggaran pemerintah di sektor pendidikan selalu dipacu setiap tahun. BLSM dan dana BOS yang dikururkan dalam rangka mengurangi beban biaya pendidikan sudah selayaknya mampu memberantas buta huruf di kota ini. AMH saja tidak cukup membuat kita berbangga hati, karena sesungguhnya secara nasionalpun AMH ini sudah mencapai level maksimal. Sudah

saatnya kita beralih ke target-target pendidikan lainnya seperti meminimalisir angka putus sekolah, meningkatkan persentase penduduk yang lulusan sarjana minimal diploma dan sebagainya. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi diharapkan pola pikir masyarakat semakin maju.

4.2 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

APS menunjukkan persentase penduduk usia tertentu yang masih bersekolah dibandingkan dengan total penduduk usia dimaksud. Dengan APS kita bisa mengetahui status partisipasi sekolah dari masing-masing kelompok usia.

Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2018

Karakteristik	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99.16	98.96	79.40
Perempuan	100.00	100.00	89.25
Kota Ternate	99.57	99.42	84.61

Sumber: BPS, Susenas 2018

Pada tahun 2018, kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak terutama wajib belajar sembilan tahun semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.1 yang menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kota Ternate tahun 2018. Penduduk

berusia 7 hingga 15 tahun berjenis kelamin wanita seluruhnya sedang menempuh pendidikan. Sedikit berbeda dengan penduduk laki-laki dengan usia yang sama yang tidak keseluruhan menerima pendidikan. Akan tetapi, angka partisipasinya cukup tinggi yakni 99,16 persen untuk penduduk usia 7 hingga 12 tahun, dan 98,96 persen untuk usia 13 hingga 15 tahun.

Kendati demikian, angka partisipasi penduduk kelompok usia 16 hingga 18 tahun masih tergolong cukup rendah, yakni 89,25 persen untuk perempuan namun tidak sampai 80 persen untuk laki-laki. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi orang tua maupun pemerintah dalam menggalakkan wajib belajar 12 tahun, dikarenakan tingkat persaingan lapangan kerja semakin tinggi dan secara otomatis membutuhkan pendidikan minimal yang juga tinggi.

4.3 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

APM adalah proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun.

APM umumnya digunakan untuk melihat proporsi penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Jika APM mencapai 100 persen artinya semua anak usia sekolah telah

bersekolah tepat waktu. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen.

Tabel 4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Ternate 2018

Karakteristik	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	94.69	74.05	66.85
Perempuan	95.27	79.61	60.85
Kota Ternate	94.97	76.47	63.68

Sumber: BPS, Susenas 2015-2018

Tabel 4.2 menunjukkan murid yang bersekolah tepat waktu paling banyak pada jenjang SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan, APMnya cenderung mengecil. Nilai APM pada tahun 2018, pada jenjang SD dan SMP cukup tinggi yakni melewati 75 persen, akan tetapi APM untuk jenjang SMA masih pada angka 63,68 persen. Selain itu, jika dilihat menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa hampir pada tiap jenjang sekolah APM perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, namun APM jenjang SMA perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan selisih yang cukup banyak.

BAB V

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



**STATUS
PENGUASAN
RUMAH
MILIK SENDIRI
70,42 PERSEN**

**SUMBER UTAMA
PENERANGAN
PLN
84,61 PERSEN**



5 Perumahan dan Lingkungan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah fasilitas perumahan yang dimiliki oleh penduduknya. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok selain pangan dan sandang. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk terus bertahan hidup. Saat ini, keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi sudah menjadi gaya hidup dan simbol status bahkan juga menunjukkan identitas pemiliknya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah dan fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas dilihat dari jenis lantai terluas, atap dan dinding. Sedangkan fasilitas dilihat dari sumber air minum, fasilitas buang air besar rumah tangga dan sumber penerangan.

5.1 FASILITAS RUMAH TINGGAL

Fasilitas yang akan dipotret di sini adalah ketersediaan air minum bersih, jamban sendiri dan penerangan memadai. Air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air minum bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minum. Sumber air minum yang

berasal dari air kemasan, isi ulang, dan leding masih dianggap lebih baik karena sifatnya higienis dibanding sumber lainnya.

Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan di Kota Ternate, 2018

Tahun	Sumber Air minum		Sumber air utama selain minum menggunakan ledeng	Jamban Sendiri	Sumber Utama Penerangan PLN
	Bersih	Layak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	91,95	41,60	80,40	72,96	99,49

Sumber : BPS, Susenas 2018

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sumber air utama yang digunakan untuk selain minum (memasak, mencuci, dll) merupakan salah satu indikator kelayakan fasilitas rumah tinggal. Selain penggunaan air kemasan dan air isi ulang yang memang digunakan untuk penyediaan air minum, sumber air minum yang berasal dari ledeng merupakan salah satu pelayanan publik yang sangat penting untuk mengimbangi pertumbuhan pemukiman. Pada tabel 5.2 terlihat bahwa 80,40 persen penduduk Kota Ternate telah menggunakan air ledeng sebagai sumber air utamanya.

Akan tetapi, meskipun 91,95 persen penduduk Kota Ternate sudah menggunakan sumber air minum yang bersih, namun pengguna sumber air minum yang layak belum mencapai setengah dari jumlah penduduk. Kota Ternate terancam menghadapi krisis air akibat tingginya kebutuhan yang tidak

ditunjang ketersediaan air yang memadai. Potensi air tanah yang kian hari semakin mengecil suatu saat bisa terancam habis. Hal ini seharusnya menjadi pemikiran oleh pemerintah daerah mengenai ketersediaan akses air bersih di Kota Ternate. Mulai 2015, pemerintah daerah mulai mencanangkan program pembuatan sumur resapan sebagai solusi dalam mengatasi ketersediaan air bersih.

Sumber air minum yang memenuhi standar kesehatan tidak hanya berdasarkan letak asal sumber air minum itu saja, namun ada syarat lain yang menyertai apakah suatu sumber air minum tersebut memenuhi standar kesehatan atau tidak.

Selain air bersih, sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan. Selain itu sistem pembuangan juga erat kaitannya dengan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri.

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa penduduk Kota Ternate yang menggunakan jamban sendiri adalah sejumlah 72,96 persen. Hal ini berarti masih ada 27,04 persen penduduk Kota Ternate belum menggunakan jamban sendiri bahkan ada yang tidak memiliki fasilitas. Perlu berbagai upaya untuk memperbaiki

keadaan ini, antara lain dengan memperbanyak fasilitas buang air besar umum yang layak, sehingga rumah tangga yang belum punya fasilitas buang air besar di Kota Ternate dapat terbantu dan menjadi lebih sehat.

Jika ditinjau dari segi tempat pembuangan akhir tinja, hasil Susenas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kota Ternate juga sudah menggunakan tangki septik yang dinilai paling baik dibanding jenis pembuangan lainnya. Persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik bahkan sudah mencapai 97,54 persen. Namun demikian, pemerintah masih harus terus bekerja keras membangun kesejahteraan di bidang perumahan dan lingkungan ini mengingat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sedangkan masih 2,46 persen penduduk melakukan pembuangan akhir tinja tidak pada tangki septik/SPAL.

Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Ternate, 2018

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	2018
(1)	(2)
Tangki Septik/SPAL	97,54
Lainnya	2,46
Jumlah	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2018

Fasilitas lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik,

karena cahaya listrik lebih terang dan lebih sehat dibandingkan sumber penerangan lainnya.

Pada tahun 2018, hampir seluruh sumber penerangan utama penduduk Kota Ternate merupakan listrik PLN yakni sebesar 99,49 persen.

5.2 STATUS PENGUASAAN BANGUNAN

Selain kualitas dan fasilitas perumahan, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah status penguasaan bangunan yang ditempati. Kepemilikan bangunan juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Bangunan milik sendiri mengindikasikan kesejahteraan dari si pemilik.

Tingginya permintaan akan perumahan sejalan dengan penambahan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia akan kenyamanan dan perlindungan. Namun hingga saat ini, tidak semua rumah tangga memiliki rumah sendiri dalam hal kepemilikan. Hasil Susenas 2018 menunjukkan mayoritas rumah tangga di Kota Ternate menempati bangunan milik sendiri (yaitu sebesar 63,80 persen, sedangkan 36,20 persen lainnya sewa (kos bulanan), bebas sewa, dinas maupun lainnya).

Tabel 5.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan yang Ditempati, 2018

Status Penguasaan Bangunan yang Ditempati	
(1)	(2)
Milik Sendiri	70,42
Lainnya	29,58

Sumber: BPS, Susenas 2015-2018

Pemerintah melalui BTN dan PERUMNAS serta *Developer* Swasta terus berusaha menyediakan perumahan bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah sendiri. Penyediaan rumah tersebut dilakukan antara lain dengan cara pembayaran angsuran, walaupun disadari perumahan yang ditawarkan tersebut belum semuanya memenuhi persyaratan kelayakan kesejahteraan bagi yang penghuninya karena keterbatasan dana dan kemampuan pemerintah serta masyarakat itu sendiri.

BAB VI SOSIAL LAINNYA



**PENGGUNAAN
TELEPON
SELULER
85,43 PERSEN**

**MENGAKSES
INTERNET
56,4 PERSEN**

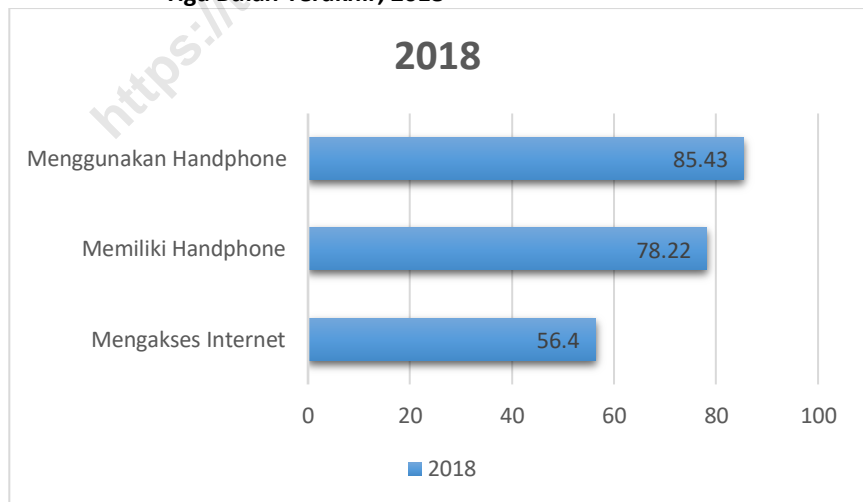


6 Sosial Lainnya

Selain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi dan perumahan, masih ada indikator sosial lainnya tidak termasuk dalam enam aspek tersebut yang juga mencerminkan kesejahteraan. Indikator tersebut diantaranya: persentase penduduk menguasai teknologi komunikasi seperti, telepon seluler, desktop dan laptop, persentase rumah tangga membeli beras miskin, serta persentase penduduk menjadi korban kejahatan.

6.1 AKSES PADA TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Gambar 6.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2018



Sumber : BPS, Susenas 2018

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan

teknologi, maka sarana komunikasi pun terus mengalami perkembangan. Sarana komunikasi dan informasi yang dipotret dalam Susenas antara lain telepon seluler/HP, laptop/dekstop dan akses internet.

Gambar 6.1 memberi gambaran bahwa penggunaan telepon seluler saat ini lebih populer di kalangan masyarakat dibanding telepon rumah. Sebanyak 85,43 persen penduduk Kota Ternate yang berusia lima tahun ke atas telah menggunakan telepon seluler (*handphone*) dalam tiga bulan terakhir meskipun kepemilikannya masih 78,22 persen. Meski sudah hampir keseluruhan penduduk Kota Ternate yang berusia lima tahun ke atas telah menggunakan telepon seluler namun penduduk berusia di atas lima tahun yang dapat mengakses internet masih sebanyak 56,4 persen. Di satu sisi hal ini positif apabila pembatasan yang dilakukan adalah untuk konten negatif. Di sisi lain, Kota Ternate merupakan pusat pendidikan dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara, persentase penduduk yang mengakses internet selama tahun 2018 masih terhitung sedikit.

6.2 PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Terdapat beberapa program perlindungan sosial yang mencerminkan kesejahteraan, seperti raskin, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2018

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
(1)	(2)
Raskin/Rastra	4.89
Program Indonesia Pintar (PIP)	4.18
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	5.08
Program Keluarga Harapan (PKH)	0.97

Sumber : BPS, Susenas 2018

Raskin atau rastra merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.

Sedangkan, Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Program perlindungan sosial yang terakhir yaitu Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013.

Berdasarkan tabel 7.2, pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang menerima bantuan dari pemerintah berupa rastra adalah sebanyak 4,89 persen. Rumah tangga yang menerima bantuan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 4,18 persen, rumah tangga penerima KPS/KKS sebanyak 5,08 persen dan rumah tangga penerima bantuan PKH sebanyak 0,97 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- 2017, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate 2017**. Ternate:
Badan Pusat Statistik Kota Ternate
- 2018, **Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate 2018**. Ternate:
Badan Pusat Statistik Kota Ternate

<https://ternatekota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kota Ternate

Jl. Cengkeh Afo No. 262 RT 02/RW 01 Kelurahan Marikrubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Telp./Fax.: (0921) 3121650.

email: bps8271@bps.go.id ; @bps8271@gmail.com

website: ternatekota@bps.go.id